

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan.. yaitu sebelum masuknya perkebunan Eropa ke Kota Medan yang mengundang banyak pendatang dari berbagai wilayah dan bangsa, di pulau Jawa sendiri sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, sudah berlaku sebuah kebijakan yang berfungsi mengontrol masyarakat Hindia Belanda agar menjalankan perannya masing-masing berdasarkan stratifikasi sosial yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Munculnya dan berlakunya kebijakan ini telah merubah susunan stratifikasi sosial yang dulu ada di Hindia Belanda sebagai negeri jajahan dan khususnya di Kota Medan. Kebijakan ini adalah suatu politik kolonial Belanda yaitu politik rasial di negara jajahan. Setelah Medan berkembang menjadi suatu kotapraja (Gemeente) di Sumatera Timur pada tahun 1918, kebijakan politik rasial ini sebagai salah satu bentuk politik kolonial Belanda di negeri jajahan di berlakukan juga di Kota Medan. Kebijakan ini juga diberlakukan agar tiap golongan masyarakat melakukan peran masing-masing dalam bidang ekonomi, sosial dan hukum.
2. Setelah Medan berkembang dan berganti status menjadi sebuah Gemeente (Kotapraja) pada tahun 1918 dengan walikota pertama yang menjabat adalah Daniel Mckay. Maka politik rasial ini mulai juga diberlakukan di kota Medan agar tiap golongan menjalankan perannya dalam bidang ekonomi, sosial dan hukum. Adapun Bentuk-bentuk Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan adalah:

a. Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi setiap kelas atau golongan masyarakat mempunyai peran sendiri-sendiri seperti orang Eropa sebagai kelas tertinggi mempunyai peran dalam pembukaan perkebunan, ekspor-impor dan pembukaan kantor dagang di kota Medan. Orang Cina mempunyai peran sebagai pedagang perantara antara orang Eropa dan Pribumi. Orang India mempunyai peran sebagai pedagang kecil. Sedangkan pribumi yang mayoritas Jawa bekerja sebagai kuli di perkebunan. Orang Melayu dan Minangkabau yang memiliki tanah biasanya menyewakan tanah atau menjualnya ke pada orang Eropa, sebagian besar orang Minangkabau bekerja sebagai pedagang kecil yang bersaing dengan orang Tionghoa.

a. Dalam Bidang Sosial

Dalam bidang Sosial yang menjadi bentuk politik rasialnya adalah munculnya golongan-golongan kelas baru dalam masyarakat dalam bentuk stratifikasi sosial yang dibedakan berdasarkan Ras. Kemudian untuk mempertahankan kemajemukan masyarakat ini dalam bentuk stratifikasi sosial, maka didirikan lembaga pendidikan untuk mempertahankannya. Dibangun sekolah-sekolah berdasarkan kelas sosial, sehingga tiap golongan tidak bisa memasuki sekolah yang bukan khusus untuk mereka walaupun tidak terlepas kemungkinan ada dengan persyaratan tertentu.

b. Dalam Bidang Hukum

Dalam bidang Hukum, terdapat bentuk rasial yaitu adanya sifat eksklusif suatu kelompok masyarakat berdasarkan status hukum penduduk yaitu yang dianggap rakyat Gubernemen, tinggal didalam kota, dan bebas dari kerja wajib. Sedangkan rakyat Sultan, tinggal di luar kota dan mempunyai kewajiban untuk kerja wajib.

Dalam pembentukan Dewan Kota (*Gemeenteraad*), sebelum pemilihan anggota Dewan Kota, pemilih yang ingin ditetapkan sebagai pemilih harus

memenuhi syarat tertentu. Kemudian untuk dapat duduk dalam Dewan Kota hanya tersedia beberapa kursi untuk tiap golongan, sehingga formasi yang didapat pada tahun 1919 didalam Dewan Kota adalah 10 orang Eropa, 5 orang Bumiputera Indonesia, dan orang Timur Asing. Dengan kewenangan walikota mengangkat ketua dari *Gemeenteraad* (Dewan Kota), yang bersama-sama menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan *Raad van Burgermeester en Wethouders* “(Dewan Pemerintahan Kota).”

3. Politik rasial sebagai salah satu bentuk politik kolonial Belanda yang berlaku juga di kota Medan mempunyai jejak-jejak yang tampak sampai sekarang. Adapun jejak-jejak Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan yang tampak sampai sekarang adalah:

a. Pemukiman

Pemukiman yang tampak sampai sekarang akibat dari berlakunya politik rasial adalah seperti di Polonia, Kesawan, Kampung Keling dan Kota Maksom

a. Pekuburan

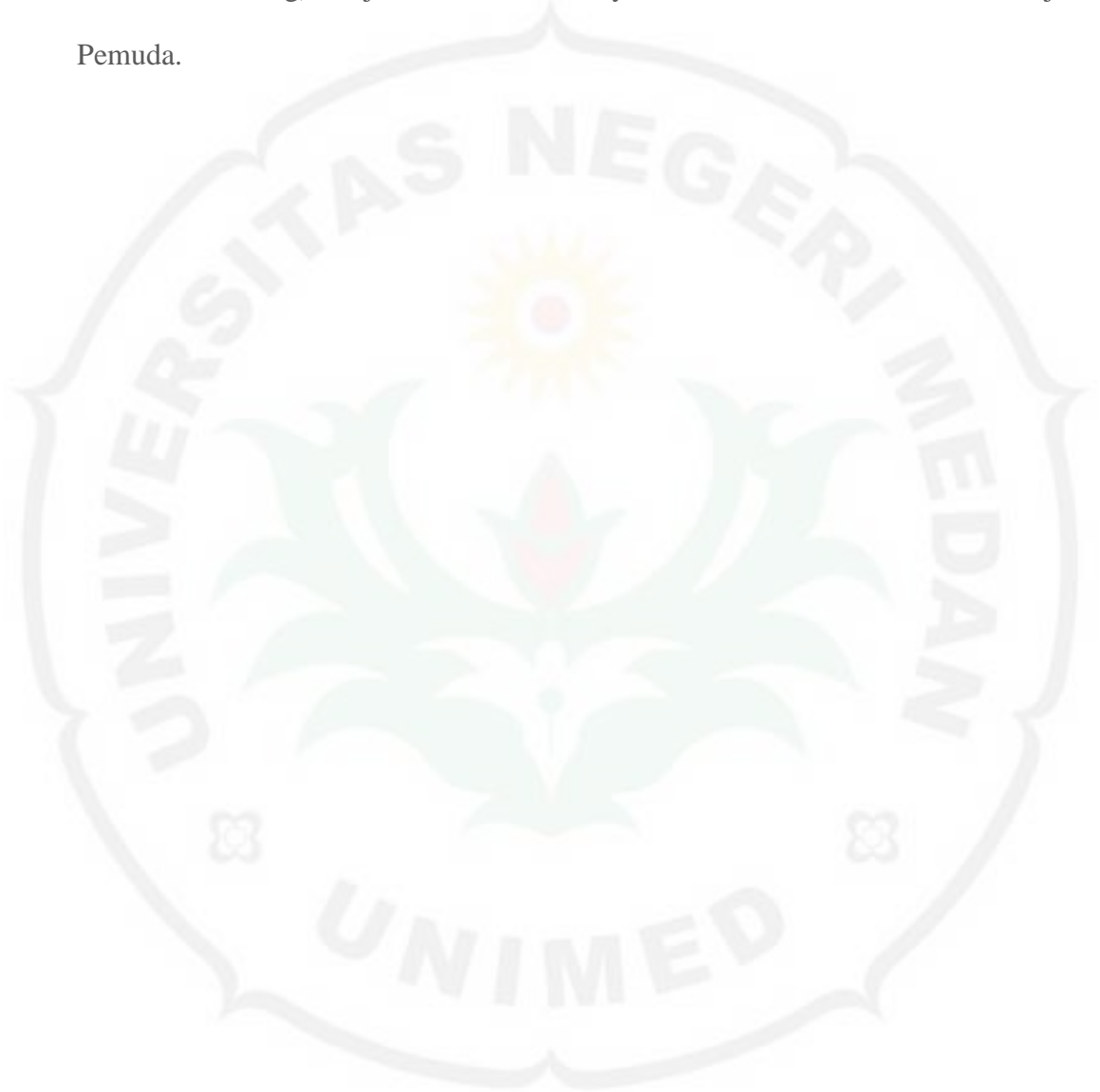
Pekuburan yang dimaksud di sini adalah munculnya pekuburan-pekuburan berdasarkan golongan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah Belanda di kota Medan.

b. Sekolah

Dibentuknya lembaga pendidikan yaitu sekolah di kota Medan oleh pemerintah Belanda. Hal ini sejalan dengan politik rasial kolonial Belanda di kota Medan yaitu mempertahankan kemajemukan masyarakat dalam bidang sosial dan budaya dengan mendirikan lembaga pendidikan sebagai wadah mempertahankan kemajemukan itu.

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda bersifat rasial karena golongan yang boleh memasukinya haruslah golongan tertentu saja, walaupun tidak tertutup kemungkinan masuk golongan lain tetapi dengan persyaratan tertentu. Sekolah-

sekolah ini masih dapat dilihat antara lain sekolah Princes Beatrix school (sekolah Imanuel sekarang) di jalan Selamat Riady dan sekolah Katolik Roma di jalan Pemuda.



THE
Character Building
UNIVERSITY

B. SARAN

Adapun saran-saran yang diajukan berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Perlunya ditanamkan sikap menghargai perbedaan budaya dan sosial kepada generasi muda di kota Medan dan bukan sebagai factor perceraian kesatuan masyarakat di kota Medan.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar tetap menjaga jejak-jejak dari pada politik rasial ini dan melestarikan sebagai saksi sejarah sejarah yang mendukung perkembangan kota Medan hingga saat ini.

